

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan sejatinya merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Sesuai dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang penting karena dapat meningkatkan kualitas diri serta memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai penting bagi masa depan manusia. Selain merupakan hak asasi bagi setiap orang, pendidikan juga merupakan faktor penting untuk mewujudkan wacana generasi emas 2045. Generasi emas pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tahun 2045 tentunya dapat diwujudkan melalui pendidikan yang berkualitas (Ediyono, 2022).

Pendidikan yang berkualitas pada hakikatnya dilihat dari mutu masukan (*input*) pendidikan, proses pendidikan, luaran (*output*) pendidikan, dan *outcome* pendidikan. *Input* pendidikan yang berkualitas dinilai dari kesiapan satuan pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Proses pendidikan dinyatakan bermutu apabila dapat menciptakan suasana PAIKEMB, yakni Pembelajaran yang Aktif, Inovatif, Kreatif, Menyenangkan, dan Bermakna (Siadari *et al.*, 2023).

Pemerintah Indonesia melalui Kemendikdasmen telah mengupayakan peningkatan mutu pendidikan melalui Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP merupakan kriteria minimal mengenai sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Indonesia. Terdapat 8 (delapan) standar dalam SNP yang menjadi acuan bagi satuan

pendidikan di Indonesia untuk menjalankan pendidikan yang berkualitas. Delapan standar tersebut yakni: (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian Pendidikan. Delapan standar ini wajib dipenuhi oleh satuan pendidikan untuk mencapai kriteria sekolah berkualitas (Habibah & Naimah, 2022). Kedelapan standar ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan kurikulum pendidikan.

Kurikulum pendidikan merupakan intisari kegiatan pendidikan yang memuat perencanaan, proses dan pengelolaan pendidikan, serta evaluasi hasil belajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dalam (kurikulum.kemdikbud.go.id) menyatakan bahwa pengembangan kurikulum pendidikan mengacu pada SNP, terutama Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Pengelolaan Pendidikan. Kurikulum Nasional yang telah dikembangkan selanjutnya dijadikan acuan atau pedoman bagi satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum satuan pendidikan sesuai dengan potensi dan karakteristiknya masing-masing. Kurikulum di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena kurikulum pendidikan harus disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman, kebijakan pemerintah, dan dinamika masyarakat. Saat ini, kurikulum yang berlaku di Indonesia adalah Kurikulum Merdeka yang mulai diberlakukan secara bertahap sejak tahun 2021.

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang dikembangkan secara bertahap sejak tahun 2021. Pada mulanya, kurikulum ini dikembangkan untuk mitigasi krisis pendidikan akibat pandemi Covid-19. Menteri Pendidikan pada saat

itu, Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa untuk mengatasi *learning loss* pada saat pandemi perlu diberlakukan kurikulum kondisi khusus (kurikulum darurat) yang dapat efektif memitigasi ketertinggalan pembelajaran. Menteri Pendidikan pada saat itu menyatakan bahwa kurikulum ini lebih sederhana dan mendalam karena terfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi murid pada tiap fasenya. Saat ini, Kurikulum Merdeka kembali mengalami perkembangan seiring dengan adanya pembaharuan-pembaharuan yang telah dikaji oleh Kemendikdasmen.

Kemendikdasmen melalui Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 menegaskan bahwa tidak ada pergantian kurikulum nasional. Satuan pendidikan masih bisa menggunakan Kurikulum Merdeka yang sebelumnya sudah diterapkan, namun terdapat beberapa penyesuaian yang dapat diterapkan baik secara bertahap maupun secara serentak. Penyesuaian yang paling mencolok pada penerapan Kurikulum Merdeka tahun 2025 adalah pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*). Pembelajaran mendalam atau *deep learning* menekankan pada pemahaman konsep secara menyeluruh, keterampilan berpikir kritis, serta kemampuan reflektif dalam proses pembelajaran. Melalui pembelajaran mendalam, murid diharapkan mampu mengkonstruksi pengetahuan dan menerapkannya dalam kehidupan secara nyata dan bermakna. Selain penekanan pada *deep learning*, Kurikulum Merdeka tahun 2025 juga menekankan pada penyesuaian bentuk kompetensi dan muatan pembelajaran kokurikuler yang semula ditargetkan sebagai Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), kini mengacu pada Profil Lulusan yang terdiri dari delapan dimensi yang bertujuan untuk menghasilkan individu yang berkarakter, berpikir kritis, inovatif, mampu bekerjasama, mandiri, serta memiliki

kesehatan fisik dan mental yang baik. Di samping hal tersebut, penyesuaian juga terlihat pada penyederhanaan pelaksanaan pembelajaran kokurikuler dengan mengurangi alokasi waktu yang diberikan untuk kemudian dilakukan terintegrasi dalam pembelajaran berbasis proyek, sehingga pembelajaran dapat relevan dan terhubung antara teori dengan praktik nyata (Kemendikdasmen, 2025).

Salah satu muatan mata pelajaran yang muncul dalam struktur Kurikulum Merdeka adalah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Penerapan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran IPA diartikan sebagai aktivitas dan daya usaha intelektual yang praktis, meliputi studi sistematis tentang struktur dan perilaku alam semesta melalui kerja ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai metode ilmiah (Zahro & Maulida, 2023). Terdapat dua unsur utama dalam IPA, yakni IPA sebagai proses dan IPA sebagai produk. IPA dilihat sebagai proses adalah kegiatan memperoleh, mengolah, dan mengembangkan pengetahuan melalui keterampilan proses dan sikap ilmiah. Sedangkan IPA dilihat sebagai produk adalah gabungan hasil penelitian baik berupa fakta, konsep, generalisasi, prinsip, teori dan hukum (Suja, 2020). Dalam pembelajaran IPA, pemahaman berpikir kritis murid dikaitkan dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*High Order Thinking Skills/HOTS*). Dalam hal ini, guru IPA memiliki tanggung jawab sebagai fasilitator pembelajaran sekaligus penggerak untuk mendorong murid agar aktif dalam proses pembelajaran. Berkaitan dengan hal ini, Kurikulum Merdeka memfasilitasi pembelajaran dengan Profil Pelajar Pancasila yang merujuk pada makna bahwa murid mampu memproses informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Dengan demikian, murid untuk menghadapi tantangan yang ada harus mempunyai kemampuan bernalar kritis, menganalisis

informasi hingga menyimpulkan informasi yang didasarkan pada metodologi ilmiah.

Pada penerapan Kurikulum Merdeka, khususnya pembelajaran IPA, masih banyak ditemukan permasalahan. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian oleh beberapa penelitian yang menemukan bahwa guru belum memahami program Kurikulum Merdeka, khususnya pada pengelolaan pembelajaran (Maulidiyah *et al.*, 2025; Mutia & Admawati, 2024; Sari, 2023). Hal ini disebabkan oleh guru yang masih terjebak dengan skema dan karakteristik pembelajaran menggunakan Kurikulum 2013. Selain itu, permasalahan yang muncul juga berasal dari guru yang kesulitan menyusun perangkat perencanaan pembelajaran, misalnya modul ajar (Athaya *et al.*, 2023; Marlensi *et al.*, 2024; Mutia & Admawati, 2024), serta guru belum memahami karakteristik asesmen pada Kurikulum Merdeka, baik dari segi asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif, sehingga guru merasa kesulitan menentukan teknik penilaian (Karengga *et al.*, 2025; Mutia & Admawati, 2024).

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan-permasalahan yang muncul sebagian besar berasal dari faktor guru yang belum memahami dan merasa kesulitan melakukan adaptasi pengelolaan pembelajaran pada Kurikulum Merdeka. Ditemukannya permasalahan-permasalahan implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran IPA menunjukkan bahwa terdapat indikasi pelaksanaan pembelajaran IPA yang belum berjalan baik dan belum memenuhi standar yang ditetapkan. Pelaksanaan pembelajaran yang masih belum memenuhi harapan, tentunya mempengaruhi hasil belajar serta pemahaman murid.

SMP Negeri 1 Marga merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang berada di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan terakreditasi A dan telah

menerapkan Kurikulum Merdeka secara penuh sejak tahun 2022. Berdasarkan hal ini, sudah sepatutnya pengelolaan pembelajaran di SMP Negeri 1 Marga berjalan sesuai dengan karakteristik Kurikulum Merdeka. Melalui kegiatan observasi dan wawancara pendahuluan, dapat diketahui pengelolaan pembelajaran IPA di SMP 1 Marga mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan pengawasan. Perencanaan pembelajaran dilakukan oleh guru dengan menyiapkan dokumen perangkat pembelajaran yang telah disusun berdasarkan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kabupaten Tabanan. Perangkat pembelajaran ini dijadikan acuan oleh guru IPA dalam menyusun rencana pembelajaran. Namun, pada proses perencanaan guru mengaku bahwa membutuhkan waktu untuk beradaptasi pada pembaharuan kurikulum yang muncul, padahal sekolah secara rutin telah membekali guru dengan kegiatan pelatihan penyusunan perangkat ajar pada awal tahun pelajaran. Selain itu, guru juga merasa kesulitan menggunakan perangkat elektronik dalam proses penyusunan perangkat pembelajaran.

Pada aspek pelaksanaan pembelajaran, guru merasa kesulitan dalam mengelola kelas yang berisi murid dengan latar belakang serta karakter yang berbeda-beda. Selain itu, guru merasa kesulitan untuk mengelola kelas karena rendahnya partisipasi dan keaktifan murid. Kendala lainnya yang dikemukakan oleh guru mata pelajaran IPA yakni sarana dan prasarana pendukung di laboratorium yang kurang memadai, karena laboratorium juga difungsikan sebagai ruang rapat dan ruang pertemuan. Hal ini tentunya menjadikan pembelajaran praktik IPA sedikit terganggu.

Pengelolaan pembelajaran di SMP Negeri 1 Marga pada aspek penilaian atau asesmen dilaksanakan oleh guru berdasarkan tiga jenis asesmen, yaitu asesmen

awal untuk mengetahui tingkat pemahaman awal murid, kemudian asesmen formatif yang dilakukan pada saat proses pembelajaran, dan asesmen sumatif berupa tes tulis dan lisan untuk mengetahui ketercapaian murid. Guru mengaku bahwa penilaian yang dilakukan hanya sebatas tes dan belum pernah memberikan penilaian berupa proyek dan bentuk lainnya, terutama pemanfaatan asesmen diagnostik. Pengawasan pembelajaran di SMP Negeri 1 Marga dilaksanakan oleh wakil kepala sekolah untuk melakukan supervisi pembelajaran baik pelaksanaan pembelajaran di kelas, maupun perangkat pembelajaran. Namun, pengawas sekolah hanya melakukan supervisi terhadap kepala sekolah saja.

Berdasarkan uraian di atas, dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait pengelolaan pembelajaran pada penerapan Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Marga, khususnya pada mata pelajaran IPA. Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti masih menemukan beberapa permasalahan pada pengelolaan pembelajaran di SMP Negeri 1 Marga. Penelitian ini penting dilakukan guna memperoleh gambaran secara mendetail terkait proses perencanaan, pelaksanaan, asesmen/penilaian, dan pengawasan terhadap pembelajaran IPA dalam Kurikulum Merdeka. Gambaran ini nantinya dapat bermanfaat bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran IPA. Oleh karena hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Marga”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

- 1) Guru belum memahami dan terbiasa dengan program serta pembaharuan kurikulum, sehingga guru masih terjebak pada skema kurikulum lama, dan mengakibatkan pembelajaran belum berjalan sesuai harapan.
- 2) Guru belum memahami pengelolaan pembelajaran, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen, sehingga pembelajaran tidak berjalan dengan baik.
- 3) Guru merasa kesulitan dalam mengelola pembelajaran di kelas karena karakter murid yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran berdiferensiasi khas Kurikulum Merdeka belum terlaksana.
- 4) Sebagian besar guru belum melakukan penilaian autentik dan hanya melakukan penilaian berupa tes dan lisan, sehingga penilaian proses belum nampak dalam pembelajaran.
- 5) Laboratorium IPA juga difungsikan sebagai ruang rapat dan ruang pertemuan, sehingga pelaksanaan pembelajaran praktikum sedikit terganggu.

1.3 Pembatasan Masalah

Permasalahan-permasalahan yang telah teridentifikasi berdasarkan latar belakang tentunya menyebabkan cakupan penelitian menjadi luas. Oleh karena itu, peneliti memilih pembatasan masalah yang berupa guru belum memahami pengelolaan pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, dan asesmen.

Pembatasan masalah penelitian yang dikaji pada aspek perencanaan adalah produk rencana pembelajaran berupa dokumen rencana pembelajaran, serta proses penyusunan rencana pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru pada Kurikulum Merdeka. Pada aspek pelaksanaan, peneliti membatasi kajian pada pengelolaan pelaksanaan pembelajaran IPA di kelas. Analisis yang dilakukan pada aspek asesmen difokuskan pada asesmen proses pembelajaran yang diutamakan pada hasil belajar.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat disusun pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah proses dan produk perencanaan pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Marga?
- 2) Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Marga?
- 3) Bagaimanakah proses asesmen hasil pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Marga?
- 4) Bagaimanakah proses pengawasan pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Marga?

1.5 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Mendeskripsikan dan menjelaskan proses dan produk perencanaan pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Marga.

- 2) Mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Marga.
- 3) Mendeskripsikan dan menjelaskan proses asesmen hasil pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Marga.
- 4) Mendeskripsikan dan menjelaskan proses pengawasan pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Marga.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Manfaat penelitian ini dilihat dari segi teoritis dan praktis berikut.

1.6.1 Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya kajian dan memberikan gambaran mendalam berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran IPA di SMP.

1.6.2 Manfaat Praktis

Tidak hanya memberikan manfaat secara teoretis, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat secara praktis bagi guru, sekolah, pemerintah, dan peneliti lainnya. Berikut ini manfaat praktis yang dapat ditimbulkan dari penelitian ini.

- 1) Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola pembelajaran.

- 2) Bagi sekolah, penelitian ini dapat memberikan informasi berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam satuan pendidikan.
- 3) Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai situasi nyata yang terjadi di satuan pendidikan dalam mengelola pembelajaran, sehingga pemerintah dapat mengambil langkah dan strategi untuk perbaikan pengelolaan pembelajaran.
- 4) Bagi peneliti lainnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian lainnya

